

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Amerika Serikat dengan jumlah populasi sebanyak 282.477.584 jiwa, atau setara dengan 3,47% dari total penduduk di dunia. Indonesia sebagai negara maritim dikenal memiliki wilayah seluas 70% berupa laut dengan luas mencapai 6,4 juta km². Indonesia juga dikenal sebagai Archipelago state atau negara kepulauan, dimana Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat 17.024 pulau yang telah diberi per tahun 2023. Dengan kondisi yang seperti ini tentu saja Indonesia memiliki sumber daya laut dan pariwisata sehingga dapat memperkuat sektor maritim bagi Indonesia. Adanya keadaan seperti ini bagi negara Indonesia tidak serta merta berjalan dengan mulus banyak tantangan yang perlu diperhitungkan salah satunya yaitu pertahanan dan keamanan wilayah yurisdiksi dan perbatasan dengan memaksimalkan penjagaan, pertahanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.²

Secara geografis letak wilayah negara Indonesia berpotongan dengan samudran pasifik dan samudra hindia serta benua asia, menjadika wilayah laut Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara

² Febiana R dan Agussalim Burhanuddin, “ Implementasi Kebijakan Sekuritas Maritim Presiden Jokowi dalam Menghadapi Aktivitas Ilegal Di Perairan Indonesia”, *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, Vol 04 No. 02 2023. Hlm 03

perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi

Indonesia untuk mendukung sektor perdagangan dan menambah devisa negara. Perdagangan Internasional merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perdagangan internasional juga memfasilitasi tingkat industrialisasi yang lebih tinggi, perkembangan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan internasional merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara.³

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika ditelisik, masalah kemiskinan memang selalu ada di setiap zaman mulai dari awal abad hingga masa ini. Berdasarkan laporan world bank tahun 1996, jumlah penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 1,19 milyar jiwa yang sebagian besarnya di dominasi oleh kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Dari awal kemerdekaannya pada tahun 1945, kemiskinan menjadi masalah yang tidak luput hingga saat ini. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia,

³ Saidina Putri, Hendra Ibrahim. "Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal Minfo Polgan Volume 12, Nomor 2, Desember 2023. Hlm 02

kemiskinan masih menjadi masalah utama. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat krusial karena banyaknya konsekuensi yang akan berdampak pada beberapa aspek termasuk ekonomi. Kemiskinan merupakan ⁴masalah jangka panjang yang kompleks dan multidimensional sehingga harus ditemukan solusi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan kekayaan sumber daya yang melimpah baik dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain, namun dari segi pemerataan pembangunan masih belum merata di seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, masih banyak ketimpangan pendapatan yang perlu di perbaiki. Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur di gambarkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Prov. Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber: <https://searchengine.web.bps.go.id>

⁴ NPAP Margareni, Ketut Djayastra, GWM Yasa, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali”, *Jurnal Piramida*, Vol. XII No. 1 juli 2016

Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami penurunan tetapi pada tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan karena disebabkan oleh adanya wabah covid-19 seperti yang terlihat pada grafik diatas. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan sebesar 12,42%, pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan menjadi 11,46% karena adanya wabah covid-19, lalu dengan berkurangnya wabah covid-19 pada tahun 2023 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 10,35% di Provinsi Jawa Timur. Walaupun presentase kemiskinan menurun setiap tahun, namun masih ada kemungkinan terjadi kenaikan lagi karena adanya laju pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya, bencana alam dan lain-lainnya. Hasil usaha pemerintah yang belum merata dalam mengatasi masalah kemiskinan menjadi penyebab angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih tinggi. Padahal dapat diketahui jika dampak dari kemiskinan sangat buruk bagi perekonomian suatu daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur.⁵

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemiskinan di setiap daerah juga berbeda. Berikut merupakan data kemiskinan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2023.

⁵ Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 12(No 2), November 2021. Hlm 03

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Secara umum tingkat kemiskinan di Jawa Timur menurun dari tahun 2019 hingga 2023, tetapi apabila dilihat dari segi kabupaten/kota pada tahun 2019 rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur adalah 10,37% dan masih ada sekitar 13 kabupaten yang tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi. Pada tahun 2023 rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah 10,35% hanya turun 0,2% dari tahun 2019, hal ini terjadi karena pada tahun 2019 munculnya wabah covid-19 sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal dan kurangnya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2022 angka kemiskinan sudah mulai turun akan tetapi provinsi Jawa Timur masih tergolong sebagai provinsi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi dan berada diatas garis kemiskinan nasional.⁶

Pada September 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Timur tercatat 9,56 %, turun sebesar 0,23 poin dibandingkan Maret 2024 (9,79 %) artinya sekitar 3,89 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan, turun dari 3,98 juta sebelumnya, Penurunan ini tersebar di dua sektor: di perkotaan, jumlah penduduk miskin turun dari 7,12 % menjadi 6,83 % (penurunan 54 ribu orang), dan di pedesaan dari 13,30 % menjadi 13,19 % (penurunan 35 ribu orang) tetapi pemerintah belum sepenuhnya berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin karena masih tingginya rendahnya Tingkat literasi dan keterampilan teknis masih menjadi masalah, terutama di daerah pedesaan atau daerah dengan ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Keterbatasan lapangan kerja dan tingginya pengangguran juga menjadi masalah utama dalam mengatasi kemiskinan Banyak

⁶ Dalam <https://searchengine.web.bps.go.id>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 20.00

pekerjaan yang tersedia di sektor informal atau dengan upah rendah, yang tidak memberikan jaminan sosial atau kesejahteraan yang cukup bagi pekerja.. Hal ini menandakan masih banyaknya masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apabila berhasil, pembangunan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuat distribusi pendapatan lebih merata. Selain pertumbuhan ekonomi yang positif, potensi dana ZIS menjadi peluang besar bagi Provinsi Jawa Timur karena Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan jumlah muzakki tertinggi, sehingga dapat menjadi salah satu metode untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi ini.⁷ Berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional, juga dikenal sebagai BAZNAS, dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. BAZNAS membuat kontribusi dana zakat terhadap perekonomian semakin merata. Berikut data perolehan dan pendistribusian ZIS di Baznas, Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2 Distribusian ZIS Baznas

Tahun	Pengumpulan (Miliar)	Penyaluran (Miliar)
2019	11,667,075,099	11,330,347,894
2020	16,535,217,996	16,535,217,996
2021	17,622,578,248	16,366,943,175
2022	37,019,742,886	23,739,180,802
2023	49,446,175,862	47,601,019,998

Sumber: Baznas Provinsi Jawa Timur

⁷ Annisa Zetira, Nur Fatwa. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2 September 2021. Hlm 02

Dapat dilihat dari data di atas bahwa jumlah zakat, infaq, dan sedekah yang diterima sangat besar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penghasilan atau pendapatan masyarakat. Selaras dengan penelitian Eris Munandar, Mulia Amirullah dan Nila Nurochani menyatakan penyaluran dana zakat, infak, sedekah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menguatkan bahwa zakat, infak, sedekah sangat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.⁸

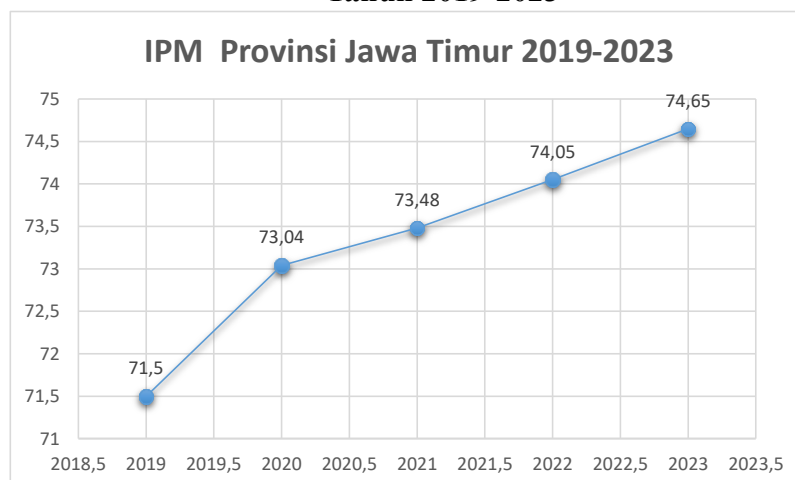
Selain potensi dana ZIS, kualitas sumber daya manusia yang buruk adalah faktor lain yang berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan. Karena IPM memungkinkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan individu. IPM ini mencakup tiga hal yaitu: indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang mampu memberikan gambaran dalam pembangunan manusia. Masyarakat yang sejahtera memiliki tiga hal di atas. Menurut (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014) Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan

⁸ Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume 01, No. 01 (2020). Hlm 03

pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga indikator, yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak. Konsep pembangunan manusia yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100,0, dengan nilai IPM di atas 80,0 sebagai kategori sangat tinggi, nilai IPM antara 70-80 sebagai kategori kedua, dan nilai IPM antara 70- 80 sebagai Kategori ketiga adalah kategori tingkat menengah dengan nilai IPM antara 60-70, dan kategori tingkat rendah dengan nilai IPM kurang dari 60. bawah ini adalah data nilai Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga 2020.

**Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Prov. Jawa Timur
Tahun 2019-2023**



Sumber: <https://jatim.bps.go.id>

Pada tabel diatas dapat dilihat perkembangan IPM di Provinsi Jawa Timur secara garis besar mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2019-2020 terjadi wabah covid-19 Provinsi Jawa Timur tetap mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena Selama periode 2019 hingga 2020, komponen kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 71,30 tahun, meningkat 0,12 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,19 tahun, meningkat 0,03 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,78 tahun meningkat 0,19 tahun. Hanya komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang turun, dari Rp. 11,74 juta (2019), menjadi Rp. 11,60 juta (2020) atau turun Rp. 138 ribu akibat pandemi Covid-19.⁹

Pada tahun 2023 IPM di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan di semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,87 tahun, meningkat 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,37 menjadi 13,38 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,03 tahun menjadi 8,11 tahun pada tahun 2023. Sumber

⁹Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam “<https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2020/02/17/1149/indeks-pembangunan-manusia--ipm--jawa-timur-tahun-2019-mencapai-71-50.html>” di akses pada 15 september 2023, pukul 12.10

data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 429 ribu rupiah (3,58 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran ril per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.¹⁰

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kekurangan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan layanan kesehatan, dan pendidikan disebut berada dalam kemiskinan. Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kemiskinan seperti keadaan hidup, pendapatan, dan akses terhadap layanan penting. Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Program bantuan sosial merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan materi atau finansial kepada sekelompok yang kurang mampu atau rentan di masyarakat.¹¹

Tujuan bantuan sosial adalah untuk mengentaskan kemiskinan, yang mengandung arti bahwa bantuan sosial merupakan suatu kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak mempunyai manfaat sumber pendapatan. Beragam program bantuan sosial tersedia, antara lain Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH),

¹⁰Badan Pusat statistik.Provinsi Jawa Timur dalam “<https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/01/1386/indeks-pembangunan-manusia--ipm--jawa-timur-tahun-2023-mencapai-74-65.html>” di akses pada 15 september 2023, pukul 12.10

¹¹ Chres Dian Veronika Zalukhu, Fani Izwar, dkk.”Pengaruh Program Bansos Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Padang”. *Jurnal Ilmu Multi Disiplin*, Vol. 3, No. 1, Juni 2024

Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Sosial Desa. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD).

Bantuan sosial pemerintah merupakan pemberian dari pemerintah dalam bentuk barang ataupun uang kepada masyarakat dan dilakukan secara selektif serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini bantuan sosial pemerintah dimana program kerjanya dapat diamati dari indikator berupa ketepatan tujuan dan sasarannya kepada masyarakat yang kurang mampu.¹²

**Gambar 1.2 Realisasi Bantuan Sosial Prov. Jawa Timur
Tahun 2019-2023**



Sumber: <https://jatim.bps.go.id>

Pada Tabel diatas variabel bantuan sosial yang dipresentasikan oleh jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dilihat bahwa di tahun 2020 bantuan social realisasiya turun menjadi 50% Turunnya realisasi bantuan sosial (bansos)

¹² Dwi Urip Wardoyo, Furqan Ramadhan Jazadi. "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pemerintah Dan Literasi Keuangan Terhadap Mahasiswa Yang Terdampak COVID-19". *Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi dan Akutansi*, Vol3No. 1 Januari(2023)

menjadi 50% di Jawa Timur pada tahun 2020 disebabkan oleh kesalahan penerima data , di mana banyak penerima tidak sesuai kriteria, termasuk yang sudah meninggal atau tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya lamanya administrasi dalam penyaluran, seperti pemotongan dana oleh oknum dan keterlambatan distribusi. Selain itu, proses pengelolaan data yang tidak efektif juga berkontribusi pada masalah ini, menyebabkan ketidak akuratan dalam penyaluran bansos.

Pada tahun 2021, realisasi anggaran PEN Kemensos di Jawa Timur hampir mencapai 98%. Mensos melakukan pencairan bansos di Kabupaten Trenggalek dan Kota Surabaya. Mensos menginstruksikan pencairan bansos secara manual di Kota Surabaya karena banyak KPM yang belum mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pemerintah daerah di berbagai daerah menindak lanjuti arahan Mensos dengan menggelar pencairan bansos secara serentak.

Penelitian mengenai pengaruh bantuan social (bansos) terhadap kemiskinan pernah diteliti oleh Lisa Agustin dan Hadi Sumarsono tahun 2020¹³, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada variabel bantuan sosial yang dipresentasikan oleh jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tidak ada hubungan atau pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan karena realita yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan banyak tunjangan yang didapat masyarakat melalui program bantuan sosial tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk

¹³ Lisa Agustin, Hadi Sumarsono. “Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri ISSN*. Volume 7 No. 2 Tahun 2022

meningkatkan kesejahteraan keluarga , akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Celeste.Ch.E.Rarun1, George M.V. Kawung, dan Audie O.Niode dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa bantuan sosial memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada pengaruh distribusi zakat, infak, sedekah (ZIS), indeks pembangunan manusia dan bantuan sosial terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian sebelumnya belum ada yang pernah menyamai dengan fokus penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan pengetahuan baru dan menjadi bahan pertimbangan bagi suatu lembaga dan pemerintahan dalam melaksanakan program penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan bantuan sosial (bansos) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Beberapa fenomena diatas melatarbelakangi untuk melakukan penelitian terhadap masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu penulis menganggap perlu dilakukan analisis mengenai “ **Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), Indeks Pembangunan Manusia, (IPM) dan Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur**”

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih tergolong tinggi terutama di Kabupaten yaitu Kab. Pacitan, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep
2. Distribusi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) cenderung mengalami peningkatan bahkan Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan muzakki terbanyak sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk menurunkan kemiskinan di Provinsi namun faktanya angka kemiskinan masih tinggi.
3. Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, pada Provinsi Jawa Timur IPM tergolong tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Bantuan Sosial dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi karena pada tahun 2020 realisasi bantuan sosial masih rendah karena kesalahan data yang di dapat dan kesalahan pemberian bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria.

Agar penelitian ini lebih efisien, maka dibatasi masalah penelitian mengenai Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia, dan Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah Pengaruh Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
4. Apakah Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia, dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Distribusi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Distribusi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia, dan Bantuan Sosial secara simultan Terbuka Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian yaitu batasan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti atau penulis yang terdiri dari variabel yang digunakan, berapa banyak subjek yang akan diteliti, materi yang dikaji, dan sebagainya. Pembatasan masalah diperlukan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok permasalahan agar penelitian lebih terarah dan dapat memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yaitu suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar efektif dan efisien berguna untuk memisahkan aspek tertentu dalam objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang telah diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi ini. Adapun variabel-variabel yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

- a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Distribusi Zakat Infaq Sedekah (X1) Indeks Pembangunan Manusia (X2), Bantuan Sosial (X3)
- b. Variabel terikat (Y) yaitu Kemiskinan

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian meliputi terbatasnya waktu yaitu periode 2018-2023 pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, selain itu Penelitian menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan variabel, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa

Timur, sedangkan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel Pengaruh Distribusi Zakat Infaq Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia, dan Bantuan Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat Menambah wawasan dan menyempurnakan pengetahuan keilmuan bagi peneliti. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam ekonomi syariah terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS dan pemerintah Jawa Timur dalam pembuatan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal pengentasan masalah kemiskinan di provinsi Jawa Timur

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan di Jawa Timur

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami judul, mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini, serta

membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

1. Secara Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas dapat ditemukan definisi konseptual dari masing-masing variable, sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang mengalami ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kurang mampu dalam menjamin kelangsungan hidup¹⁴.

b. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama untuk diberikan kepada delapan golongan sesuai tuntunan QS. At-Taubah ayat 60.

Sedangkan Infaq dan Sedekah, menurut UU nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq, merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah ialah harta atau nonharta yang dikeluarkan

¹⁴ Paramita, et.all, Pengaruh Investasi dan pengangguran Terhadap Tingkat kemiskinan serta Kesehatan di Provinsi Bali, E-Jurnal EP Unud, Vol 4 No. 10, 2015, Hlm. 2

oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁵

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah, mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.¹⁶

d. Bantuan Sosial

Bantuan sosial dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15 adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional, “ pengertian zakat *infaq, sedekah*”, dalam <https://baznas.go.id/faq-baznas> di akses pada 24 September 2024 pukul 14.01

¹⁶ Suparuddin Mukhtar, Ari Saptono, As'ad Samsul Arifin, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ecoplan, Vol. 2, No. 2, Hlm. 81, 2019

2. Secara operasional

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh distribusi zakat, infaq, sedekah, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, variabel bebas terdiri dari zakat, infaq, sedekah (ZIS) (X1), indeks pembangunan manusia (X2), dan Bantuan Sosial (X3). Sedangkan variabel terikatnya berupa tingkat kemiskinan (Y)

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah baik definisi konseptual maupun definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, Bab ini memaparkan secara singkat mengenai kajian teori yang berisi penjelasan dari pengaruh distribusi zakat infaq sedekah, indeks pembangunan manusia dan bantuan sosial terhadap pengentasan kemiskinan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode penelitian, Bab ini membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: Hasil penelitian, Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V : Pembahasan hasil penelitian, Bab ini memaparkan pembahasan data penelitian dan teknik analisis data.

BAB VI: Penutup, Bab VI akan membahas terkait simpulan dari peneliti yang sesuai dengan analisis data yang telah diteliti serta saran yang diperuntukkan kepada pihak yang memanfaatkan penelitian in